

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Muhammad, 2017, *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang : UB Press.
- Anggara, Sahya, 2014, *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Firdanti, Arinda, 2018, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Siswa*. Yogyakarta : CV. GRE Publihsing.
- Mustopadidjaya, A.R., 2004, *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Duta Pertiwi Foundation.
- Reco, JR, 2010, *Metode Kualitatif : Jesin, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakara : Grasindo
- Rozaki, Aabdur, 2004, *Memperkuat kapasitas desa dalam membangun otonomi: naskah akademik dan legal drafting*. Yogyakarta : IRE Press.
- Saragi, P. Tumpal, 2004, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa : alternatif pemberdayaan desa*. Jakarta : Yayasan Adikarya IKAPI dengan Ford Foundation.
- Subarsono, AG, 2008, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R and D*. Bandung : Alfabeta.
- Suwendra, I Wayan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*.Badung : Nilacakra Publishing House.
- Thoha, M., 2012, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. A., 2004, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Reformasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.

## E-JURNAL

- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113. Retrieved from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>
- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S., (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 3. Retrieved from <https://doaj.org/article/fcb793ee2d2b4d6386ab5eed99c9247>
- Kushandajani.(2015).Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Semarang. *Politika* Vol. 6, No.2. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/10711/8499>
- Pratomo Setiaji. (2016). Perancangan Sistem Informasi Dana Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal SIMETRIS*, Vol 7 No 1. Retrieved from <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet/article/view/533>
- Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, dan Mohammad Said. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 3, Nomor 11. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/82749-ID-pengelolaan-alokasi-dana-desa-dalam-pers.pdf>
- Siti Rodhiyah & Muhammad Harir (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2. Retrieved from <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1375/1059>
- Surya Murni Siregar, Isnaini Isnaini.* (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (Add) Tahun 2014 Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)JAP* Vol.6 No.2. Retrieved from <https://doaj.org/article/1b82173152f04483b0063712b59efbaf>
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101-105. Retrieved from <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>
- Wardhani, A. P., Hasiolan, L. B., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. *Journal of Management*, 2(2). Retrieved from <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/568/553>

## INTERNET

<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/> diakses pada hari Rabu, 16 Januari 2019 Pukul 14.25 WIB.

[https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4208802/kasus-dugaan-korupsi-dana-desa-kades-tulungagung-dinyatakan-p21?\\_ga=2.117084742.1979702290.1547569670-298069373.1545297630](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4208802/kasus-dugaan-korupsi-dana-desa-kades-tulungagung-dinyatakan-p21?_ga=2.117084742.1979702290.1547569670-298069373.1545297630) diakses pada hari Senin, 21 Januari 2019 Pukul 16.08 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171020112724-12-249704/polri-temukan-214-kasus-penyalahgunaan-dana-desa> diakses pada hari Senin, 7 Januari 2019 Pukul 22.07 WIB.

<http://setkab.go.id/?s=Sosialisasi+Prioritas+Penggunaan+Dana+Desa+2019+dan+Evaluasi+Kebijakan+Pembangunan+dan+Pemberdayaan+Masyarakat+Desa+Provinsi+Banten&lang=id> diakses pada hari Kamis, 31 Januari 2019 Pukul 23.08 WIB.

## PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1979. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaan*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaan*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. 2017. *Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Anggaran 2017*. Bogor: Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemeterian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.